BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbaikan Pemerintah Indonesia dapat dilihat setelah disetujui dan diratifikasinya Kode Etik ini. 6 Tahun 2020 tentang Pemerintah Daerah dan UU ini. 7 Tahun 2020 mengacu pada anggaran bank sentral dan kota. Undang-undang tersebut seolah membawa angin segar bagi setiap daerah untuk mengatur wilayahnya, tentunya dengan banyaknya peraturan daerah, terutama mengacu pada Jurnal Infestasi Vol. 4, Tidak. 2 Desember 2019 Hal. 145 - 166 145 146 lb. 4 N0.2 2019 Buku Pedoman Pengelolaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan undang-undang dengan UU ini. 1 Tahun 2015 untuk UU ini. 6 tahun 2020, telah menjadi prioritas pertama kemerdekaan daerah. Dengan amandemen UU tersebut, telah terjadi perubahan signifikan dalam hubungan antara Komite Pengawas dan Pemimpin Daerah. Dalam Kode ini. 6 tahun 2020 pasal 40 disebutkan bahwa DPRD adalah badan perwakilan daerah dan merupakan perumahan sebagai bagian dari pemerintahan daerah dan dalam pasal 41 undang-undang yang sama., ia menulis bahwa DPRD memiliki pengawasan hukum, keuangan dan peraturan.

Peranan pemimpin dalam pelayanan publik terus meningkat setiap tahunnya, hal ini menuntut lembaga legislatif untuk mengawal pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerjanya agar berjalan lebih baik lagi. Agar efektif, sekelompok orang yang baik harus hadir. Tanda-tanda pencapaian manusia meliputi pendidikan dan pengetahuan. Sebuah studi latar belakang dapat membantu seseorang menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Kebutuhan akan latar belakang studi akan mempengaruhi kinerja seseorang.

Anggota Kota menyampaikan laporan keuangan Rancangan Kebijakan Wilayah Kota Metro tentang Perubahan Keuangan APBD Tahun 2020 di Ruang Rapat DPRD DPRD, Senin (9/7/2020). Penyusunan perubahan RAPBD 2020 merupakan ikhtisar kebijakan keuangan tahunan, review kebijakan dan perubahan tahun 2020. Ya ..

Anggota Kabupaten Achmad Pairin dalam sambutannya tentang penurunan pendapatan daerah kota metro. “laba APBD Kota Metro turun 3,1 persen yang dari target pertama Rp 943,59 miliar menjadi Rp 914,14 miliar yang terjadi di neraca. , Dispendis dan pendapatan hukum lainnya meningkat,” jelasnya.

Selain itu, belanja pada bursa APBD Kota Metro 2020 diproyeksikan meningkat sebesar 0,6% yang merupakan target utama sebesar Rp. 1,009 triliun senilai Rp. 1.015 miliar ua. Rencana Amandemen Pengeluaran Tahun 2020 menyerukan peningkatan Pengeluaran Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pemeliharaan epidemi ubid-19, yaitu menyediakan lingkungan yang lebih aman. Covid-19 membawa dampak ekonomi khususnya ekonomi global, bisnis tetap bertahan, mengembangkan rencana dan operasional pembangunan sesuai dengan proses Covid-19 dan aturan Orde Baru, termasuk pelaksanaan KPU.

Tabel 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020

No	Keterangan	Nilai	Target	Anggaran
1	Pendapatan	-3,1%	Rp. 943,59 milyar	- Rp. 914,14 milyar
2	Belanja	0,6%	Rp. 1,009 triliun	Rp. 1,015 triliun
	Jumlah			- Rp. 101,2 milyar

(Sumber : *info.metrokota.go.id)*

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2020 mengalami kekurangan sebesar Rp. 101,2 miliar timbul dari perkiraan pendapatan sebesar Rp. 914,1 miliar lebih rendah dari perkiraan biaya Rp. 1.015 miliar ua. “Kebijakan perubahan merupakan proses yang perlu kita capai pada akhir tahun berjalan, baik berjalan dengan baik, memperbaiki, mengubah atau memperbaiki. Ia berharap pada tahun 2020 perubahan tersebut dapat menyelesaikan pelaksanaan RPJMD Kota Metro dan, tentunya semua perbaikan dan kegiatan yang signifikan untuk penanganan virus Covid-19 di Kota Metro,” ujar Pairin. (info.metrokota.go.id).

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, jelaslah bahwa peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat signifikan dan signifikan dalam kemampuannya menegakkan kebijakan keuangan di bidang usaha, menguntungkan, menguntungkan, transparan, dan inklusif. Namun yang terjadi selama ini masih banyak permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh badan pengatur yang tidak dapat dikendalikan. dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. dan mengawasi operasi.

Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian penting dari setiap tahapan perencanaan dan pelaporan APBD. Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk menjamin keamanan seluruh aspek keuangan daerah, dalam rangka memenuhi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk memastikan tercapainya berbagai efisiensi dan efektivitas di bidang manajemen keuangan menurut Halim (2014: 39). Pertimbangan yang sangat penting pada tahap perencanaan keuangan diperlukan untuk memperkuat pengawasan. Kebijakan ini 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap kinerja APBD dilakukan oleh DPRD.

Peran direktur pelayanan publik terus meningkat setiap tahunnya, hal ini menuntut legislatif untuk mengawal pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerjanya agar berjalan lebih baik lagi. Agar efektif, sekelompok orang yang baik harus hadir. latar belakang ini menyangkut banyak dimensi, salah satunya adalah sejarah pendidikan. Sedangkan sejarah politik merupakan latar belakang pengalaman manusia dalam dunia politik. latar belakang ini menyangkut banyak dimensi, salah satunya adalah pengetahuan politik.

Ukuran yang digunakan untuk mengukur pengelolaan keuangan mengacu pada penelitian Kurnia Utami dan Efrizal Syofyan (2013: 63). Keterlibatan pengurus dalam penyusunan informasi umum dan kebijakan APBD, tinjauan politik rencana APBD, partisipasi anggota dewan dalam pengesahan APBD, Mampu menjelaskan APBD yang telah disusun, keyakinan gereja bahwa APBD sudah transparan, pelibatan anggota pokja APBD, review tanggung jawab gereja Tanggapan disiapkan oleh pemerintah daerah, penyelidikan oleh anggota dewan

tentang alasan atau alasan untuk mendorong munculnya kembali APBD pembaruan,

B. Identifikasi Masalah

1. Tingkat pendidikan anggota dewan terkait dengan pengawasan anggaran daerah (APBD).
2. Tingkat pengalaman kerja mempengaruhi kinerja anggota dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan anggaran daerah (APBD).
3. Pengetahuan anggota panitia anggaran daerah terbatas, yang mempengaruhi keberhasilan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah dewan penasehat anggaran mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah (APBD) Kota Metro?
2. Apakah dewan menyadari dampak anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD) Kota yang diawasi secara pribadi?
3. Apakah dewan mengetahui dampak anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD) Kota yang sedang diselidiki secara latar belakang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah pengetahuan dewan keuangan akan mempengaruhi dewan pengelola keuangan daerah (APBD) Kota Metro.
2. Untuk mengkaji apakah latar belakang pribadi dapat mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan keuangan dengan badan pengawas keuangan daerah (APBD) Kota Metro.
3. Untuk mengkaji sejarah politik yang mempengaruhi hubungan antara pengetahuan Dewan Ekonomi dan Keuangan Daerah (APBD) Kota Metro.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Mampu memecahkan permasalahan kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan pengawasan Dana Daerah (APBD) Kota Metro.

2. Bagi akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan dalam khasanah Ilmu Akuntansi pada khususnya.

3. Bagi praktis

Hasil penelitian ini dapat diberdayakan oleh para ilmuwan untuk mengkaji dan mengukur sejauh mana transparansi keuangan didasarkan pada penelitian politik dan sejarah. Berkontribusi dalam pemikiran, kritik dan advokasi pemerintah, khususnya anggota dewan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terapis membahas penelitian latar belakang, penelitian desain, penelitian objektif, penelitian terapan, dan prosedur tertulis untuk menulis tesis.

BAB II : KAJIAN TEORITIK

Peneliti membahas tentang deskripsi teori penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian (berupa makalah, hasil penelitian dan buku), penelitian sebelumnya Melibatkan isi skripsi dan dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian adalah alur penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti membahas tentang penelitian yang dalam penelitian ini meliputi pemeriksaan untuk mengetahui penilaian nilai efikasi diri dan bagaimana latar belakang dikaitkan dengan informasi dewan ibu kota DPRD Kota Metro.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan deskripsi penelitian dari data penelitian yang menggambarkan tujuan umum penelitian dan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dalam proses menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menemukan makna dan dampak dari hasil evaluasi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi informasi/konten yang diperoleh dari penelitian, serta informasi yang diberikan kepada masyarakat dan Kota Metro.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN